

KOMUNIS DI DALAM NEGERI, KAPITALIS DI LUAR NEGERI INVESTASI RRT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Rosdiansyah¹

Article history: Received: 8 June 2022, Revisi: 24 June 2022, Published: 29 June 2022

Abstract: This article examines the various investments made by Tiongkok in a number of countries, one of which is Indonesia in an effort to expand its economic hegemony in the international world. The Beijing consensus is the foundation of the People's Republic of Tiongkok in strengthening its economic position by providing foreign investment to developing countries, both in Asia and Africa. Although adopting communism as the principle of domestic politics, the pattern of expansion of investment carried out by Tiongkok under Xi Jinping actually leads to capitalism and neoliberalism as stated in the points contained in the Beijing Consensus.

Purpose: This article seeks to explore the process of Tiongkok investment abroad.

Design/Methodology/Approach: This article uses a literature review as the research method.

Findings: This article finds that despite using the ideology of communism for its domestic hegemony, Tiongkok applies a capitalist economic style in its foreign investment and foreign trade.

Originality/Value: The novelty of this article is the author's attempt to explain the differences between Tiongkok's trading style and the logic of its domestic power.

Keywords: Investation, Tiongkok, Xi Jinping

Paper Type: Article-Research

¹ Penulis adalah Dosen Luar Biasa di Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur | rosdifromindonesia@gmail.com

Pendahuluan

Xi Jinping sebagai pimpinan partai pemenang memiliki pandangan yang berbeda dengan pimpinan PKT (Partai Komunis Tiongkok) sebelumnya. Semenjak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok diproklamirkan pada tahun 1949, PKT tetap mendominasi kursi kekuasaan dan cenderung menjadi partai tunggal dominan di RRT. Sejajaran pucuk pimpinan RRT, yang memimpin dengan pandangan yang paling terbuka dan visioner adalah Xi Jinping. Tiongkok kini menjadi musuh Amerika Serikat dalam hal perdagangan. Persaingan ini kerap memunculkan dampak bagi negara lainnya, baik positif maupun negatif.

Banyak perusahaan Tiongkok yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan domestik negara lain, seperti Indonesia. Bisa kita lihat bahwa Lazada dan Tokopedia adalah Alibaba di Indonesia. Adapun merk-merk handphone seperti Huawei juga bertebaran di konter HP yang ada di negara khatulistiwa ini. Bicara tentang buku pun, hanya ada satu penerbit Tiongkok yang menerbitkan buku dalam bahasa asing: Foreign Language Press. Meskipun dalam pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahannya bercorak komunisme yang tersentral, namun perdagangannya terlihat sangat kapitalistik. Sebelum masuk kepada perekonomian Tiongkok, penulis akan menceritakan tentang perhelatan politik di RRT terlebih dahulu.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah muncul sebagai Republik Tiongkok semenjak era revolusi melawan Kekaisaran Tiongkok ditahun 1911, yang diproklamirkan pada tahun 1949. Usaha membawa demokrasi ini dibawa oleh dr. Sun-Yat Sen dan kedua muridnya: Chiang Kai Sek dan Mao Tse Tung. Perhelatan ini dikenal dengan nama Revolusi Xinhai yang bertujuan menggulingkan Dinasti terakhir di Tiongkok: Dinasti Qing dan Kaisarnya Pu-Yi dan membangun Republik Tiongkok atas dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam membentuk demokrasi, Sun-Yat Sen mencetuskan San Min Chu I, yang berarti Nasionalisme, Demokrasi dan Kesejahteraan. Tiga prinsip tersebut merupakan pegangan dari Partai Kuomintang yang

berhaluan nasionalisme. Pasca penggulingan, Tiongkok tidak baik-baik saja, antara Chiang Kai Sek dan Mao Tse Tung berebut kekuasaan, dimana Mao mendirikan Kung Cang Tang (Partai Komunis Tiongkok-PKT) yang nantinya akan menjadi dominan dan mengusir Kuomintang dari Tiongkok daratan (nantinya Kuomintang mendirikan Taiwan).

Bicara tentang partai di Tiongkok, ada dua partai besar yang sekarang dominan di dua negara "Tiongkok", yakni Kuomintang yang berkuasa di Taiwan dan Kung Cang Tang yang menjadi partai pemenang di RRT. Artikel ini akan mengulas salah satu presiden yang berasal dari Kung Cang Tang, sehingga partai yang akan sering diulas pun adalah Kung Cang Tang, adapun sisi lainnya ialah ekonomi-politik dan kebijakan yang mengilustrasikan ekonomi-politik dari RRT dibawah kepemimpinan Presiden Xi.

Kontradiksi antara urusan dalam negeri (pemerintah) dan urusan luar negeri (perdagangan) menjadi permasalahan yang paradoks bagi orang non-Tiongkok dalam melihat tata kelola pemerintahannya. Kontradiksi ini diperjelas melalui pidato-pidato Xi mengenai Komunisme sebagai dasar negaranya (RRT) namun juga mengambil bagian-bagian penting dari neoliberalisme untuk mengembangkan industri dan perdagangan melalui liberalisasi produktivitas sosial (Jinping 2017, 39).

Banyaknya barang yang *made in China* membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang ideologi yang sebenarnya dianut oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui perkembangan ekonominya. Terlepas dari pernyataan resmi ataupun pidato kenegaraan yang diberikan oleh Xi Jinping tentang Maoisme (komunisme ala Mao Tse Tung), ekspansi ekonomi RRT membuat negara ini menjadi ancaman kedigdayaan ekonomi bagi Amerika Serikat. Perang dagang Tiongkok-AS pun berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya adalah kenaikan kurs dolar AS terhadap Rupiah Indonesia.

Keterbukaan dari sistem ekonomi RRT ini bukan hal baru, bahkan reformasi ekonomi sudah dilakukan semenjak tahun 1979 yang

ditandai dengan empat hal: masuknya kembali RRT ke dalam perekonomian global, desentralisasi pengambilan keputusan dalam perkara ekonomi, berubahnya cara pemenuhan kebutuhan dari agrikultur menuju industrialisasi, dan komersialisasi besar-besaran (Johnson and Woon 1997, 731-52). Perubahan dari cara pemenuhan kebutuhan menandakan adanya Modernisasi yang berusaha dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. RRT berusaha meng-industrialisasi pedesaannya agar dapat melakukan komersialisasi sekaligus liberalisasi ekonomi pada taraf paling bawah. Keterbukaan ini semakin menjadi-jadi dengan masuknya RRT ke dalam *World Trade Organisation* (WTO) sebagai anggota pada tahun 2001.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif yang menekankan kepada studi pustaka. Untuk itu, akan banyak kutipan, baik dari buku dan jurnal yang mengulas tentang ideologi dan ekonomi politik baik PKT maupun Pemerintah RRT, didukung dengan teks-teks pidato Xi Jinping untuk merelasikan kebijakan ekonomi yang diambil dengan pandangan Presidennya.

Studi pustaka menekankan penelitian yang menganalisis teks-teks baik dari buku maupun berita mengenai studi kasus yang telah diambil. Pemberitaan merupakan sumber utama, sehingga akan menggunakan pendekatan interpretatif guna memaknai pemberitaan seputar ekonomi-politik di RRT dibawah kepemimpinan Xi Jinping.

Studi pustaka mendiskusikan mengenai sebuah informasi dalam subyek tertentu, dan terkadang dalam jangka waktu tertentu. Yang pada akhirnya bersisi keimpulan dari seluruh sumber yang telah digunakan, namun tidak hanya kesimpulan, tetapi ada sintesis dari sumber-sumber yang digunakan. Kesimpulan adalah rekapitulasi dari informasi-informasi tersebut, sedangkan sintesis adalah reorganisasi dari informasi terkait (The Writing Center n.d.).

Dengan menggunakan metode studi pustaka sistemik (*systemic literature review*), maka peneliti akan mengumpulkan artikel-artikel yang sudah diterbitkan yang sesua dengan tema yang diangkat. Ada

beberapa kriteria yang diberikan oleh pedoman University of Bedfordshire berkenaan dengan studi pustaka sistematis: relevan dengan topik yang diangkat, tahun penerbitan artikel, geografi, *peer reviewed*, dan desain studi (metodologi dalam artikel yang dikutip) dengan tambahan isu-isu etis mengenai artikel yang digunakan: bagaimana informasi didapatkan, akurasi dari informasi, dan kerahasiaan (Bedfordshire, n.d.).

Pembahasan dan Temuan

Tinjauan Teoritik: Ekonomi Politik RRT (Maoisme dan Konsensus Beijing)

Komunisme yang diterapkan oleh RRT berbeda dengan yang ada di Uni Soviet. Pasca revolusi Rusia pada tahun 1917, Lenin tidak memiliki penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan sektor agrikultur dan pertanahan yang telah dikuasai kelompok Borjuis di Rusia. Sedangkan Mao memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana seharusnya tanah dikuasai oleh petani-petani di RRT. Hal ini dijelaskan dengan mudah oleh Samir Amin dalam bukunya *The Implosion of Contemporary Capitalism*:

I must emphasize the specific nature of the response given to the agrarian question by the Chinese Revolution. The distributed (agricultural) land was not privatized; it remain the property of the nation represented by village communes, its use given only to village families. That had not been the case in Russia where Lenin, faced with the fait accompli of the peasant insurrection in 1917, recognized the private property of the beneficiaries of the land distribution. (Amin 2013, 66)

Adapun kerjasama yang dibangun antara petani miskin, petani bersawah dan petani kaya yang dibentuk Mao, menurut Samir Amin, dapat membangun aliansi yang baik dan kerjasama antara ketiga pihak yang membedakan hasil revolusi Rusia dan revolusi Tiongkok (dimana yang kedua menghasilkan keadaan yang lebih stabil). Ditambah dengan perbedaan pandangan antara di Tiongkok dan Vietnam dengan Eropa mengenai kepemilikan (property) membuat Tiongkok dan Vietnam yang tidak paham mengenai konsep kepemilikan, lebih

bisa mengambil jalan damai dalam permasalahan agraria, dibanding negara-negara Eropa yang mengenal konsep feudalisme (Amin 2013, 66).

RRT memiliki gaya ekonomi yang berbeda dengan kelompok neoliberal (*Washington Consensus*), mereka mencetuskan *Beijing Consensus* atau Konsensus Beijing. Model pembangunan ala RRT ini didasarkan atas kekuasaan yang didapatkan melalui inovasi dan kesetaraan (keadilan). Pembangunan ini berfokus pada wilayah lokal dan lebih bisa diterapkan di negara-negara lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Joshua Cooper Ramo:

Pendekatan pembangunan ala Tiongkok menekankan kepada keinginan untuk mendapatkan pertumbuhan berkualitas tinggi yang adil dan damai. Dilaksanakan melalui keinginan yang keras untuk berinovasi dan bereksperimen. Pandangan yang sangat fleksibel dari Konsensus Beijing membuatnya susah untuk disebut sebagai doktrin. Pragmatis sekaligus ideologis, refleksi atas filosofi kuno di Tiongkok. (Ramo 2004, 4)

Menurut Cheng Enfu dan Ding Xiaoqin, Konsensus Beijing merupakan neoliberalisme ala RRT atau lebih tepatnya dekat dengan Keynesian. Ada delapan prinsip dalam Konsensus Beijing yang merupakan pengembangan dari Marxisme:

- 1). Keberlanjutan melalui Ilmu Pengetahuan dan teknologi; 2). Berorientasi kepada produksi untuk kemajuan masyarakat;
- 3). Kepemilikan publik diatas hak milik negara (nasional); 4). Keutamaan tenaga kerja dalam distribusi kekayaan; 5). Penggunaan prinsip pasar yang disetir oleh pemerintah; 6). Mempercepat pembangunan dengan kinerja tinggi; 7). Pembangunan berimbang dengan koordinasi struktural; dan 8). Kedaulatan ekonomi dan keterbukaan. (Enfu and Xiaoqin 2017)

Melalui ringkasan artikel diatas, ada dua prinsip yang benar-benar menggambarkan neoliberalisme ala RRT, yakni poin 5 dan 8. Poin 5 dikeluarkan agar prinsip pasar yang liar dalam menentukan harga komoditas dapat ditanggulangi dengan turunnya pemerintah untuk menstabilkan harga pasar yang fluktuatif. Pasar yang bersifat

kapitalistik acapkali menggunakan hukum rimba dimana yang terkuat yang bertahan, dalam hal ini adalah pengusaha yang memiliki banyak pekerja. Guna menjalankan usahanya, kelompok kapitalis melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja yang hanya mendapat sebagian kecil dari keuntungan yang diraup oleh pemilik modal (pengusaha).

Kembali mengacu kepada Enfu dan Xiaoqin bahwa masyarakat sosialis dapat mengembangkan ekonominya dengan jalur yang terencana dan setara dengan pengawasan pemerintah terhadap alokasi sumberdaya dari pasar (Enfu and Xiaoqin 2017). Pasar dalam sistem ekonomi RRT bertugas untuk memaksimalkan harga komoditas di bawah pengawasan ketat oleh pemerintah, dan pemerintah sendiri memiliki tugas untuk membuat kebijakan ekonomi makro untuk menggaransi persaingan yang sehat dari pasar. Pandangan semacam ini sejenis dengan Ekonomi Keynesian yang menekankan peranan pemerintah dalam mengintervensi pasar, karena ada permasalahan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh mekanisme pasar (cont: pengangguran). Nuansa ekonomi terencana tidak sepenuhnya diterapkan dalam sistem perekonomian RRT karena mekanisme pasar pun ikut menentukan harga, namun apabila berada diluar kendali, maka negara, melalui pemerintah akan menstabilkan harga komoditasnya untuk kepentingan publik.

Jika poin kelima memperlihatkan pasar yang dipengaruhi pemerintah dalam penentuan harga komoditas, maka poin kedelapan mengusung sudut pandang RRT yang lebih terbuka terhadap prinsip ekonomi pasar. Keterbukaan merupakan prinsip utama dalam ekonomi neoliberal & kapitalis, dimana liberalisasi ekonomi dimulai. Investasi merupakan jalur utama masuknya modal kedalam suatu negara. Dan RRT dewasa ini tidak alergi terhadap investasi asing maupun domestik. Adanya keterbukaan membuat perusahaan privat dalam negeri pun dapat menginvestasikan barang, jasa maupun dana untuk pemerintah. Tujuan utama keterbukaan dagang maupun investasi dari RRT adalah pertumbuhan ekonomi dalam negeri (Enfu and Xiaoqin 2017). Investasi ini juga dilakukan oleh Tiongkok terhadap

negara lain dalam bentuk proyek, nilai valuta asing (FDI) ataupun proyek.

Corak neoliberal dan kapitalistik RRT ini diikuti dengan resiko-resiko: Pertama, akan ada perubahan pandangan dari dunia internasional terhadap RRT secara ideologis yang mengaku sebagai komunis ternyata tidak sepenuhnya mengikuti ideologi tersebut dalam perdagangan. Tetapi ada perusahaan privat yang dapat menjadi pesaing perusahaan pemerintah RRT. Kedua, banyak korupsi dan kolusi yang terjadi, seperti yang dibeberkan oleh Minxin Pei dalam bukunya *China's Crony Capitalism*, banyak skandal korupsi yang dilakukan oleh pejabat partai maupun pejabat publik berkaitan dengan proyek-proyek perdagangan sumberdaya alam Tiongkok, seperti batubara dan gas bumi.

Beberapa contohnya adalah kasus Zhou Yongkang yang terlilit oleh pertambangan, bisnis perumahan dan *liquified natural gas* (LNG) (Pei 2016, 2), Hu Jianto yang menerima suap dari pengusaha bernama Ling Jihua untuk kasus tabrakan yang dilakukan anaknya (Hu Jianto adalah salah satu Direktur Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok) (Enfu and Xiaoqin 2017), dan penyuapan Xi Caihou (Anggota Politbiro PKT) oleh Wang Chuncheng terkait kasus pertengkarannya di Bar yang berujung kematian (Enfu and Xiaoqin 2017). Parahnya korupsi yang terjadi di Tiongkok membuat Xi Jinping ketika menjabat presiden, memberlakukan hukuman mati kepada koruptor dan masa tahanan yang tidak main-main bagi para pelaku suap.

Berbedanya gaya komunisme RRT yang cenderung lebih terbuka dalam perdagangan dan investasi menandakan varian komunisme yang lebih fleksibel dibandingkan gaya Rusia. Interpretasi terhadap komunisme di RRT diikuti dengan budaya orang Tiongkok yang kental akan perdagangan. Untuk itu, komunisme di RRT memiliki sebutannya sendiri, yakni Maoisme.

Maoisme sebagai komunisme yang tidak alergi terhadap perdagangan akan menggunakan jalur paling cepat dalam perdagangan, yakni investasi. Investasi baik berupa proyek atau

perdagangan menandakan adanya mobilitas kapital dari negara lain ke dalam RRT, ataupun sebaliknya. Dan menurut Jeffrey A. Winters saat penulis kontak melalui surel mengenai mobilitas kapital, beliau menyebutkan bahwa kapital mengacu pada properti yang ditujukan untuk investasi. Banyak contohnya seperti Tanah, Bangunan atau Uang. Dari ketiga jenis kapital yang disebutkan Winters, uang merupakan kapital yang paling menakutkan, karena dapat ditarik atau dialihkan sewaktu-waktu, sesuai keinginan sang investor. Maka dari itu, RRT melakukan investasi diketiga bentuk ini dengan uang sebagai instrumen yang paling banyak digunakan dalam bentuk pinjaman untuk pembangunan.

Investasi Asing di Dalam Negeri

Karena prinsip keterbukaan dari Konsensus Beijing dan corak khusus Maoisme, maka RRT harus membuka keran ekonominya terhadap nilai valuta asing (FDI). Menurut website santandertrade.com, yang mengutip perkataan Menteri Kewirausahaan RRT bahwasanya ada 36.652 perusahaan yang didanai oleh investor asing di Tiongkok. Stok FDI negara tirai bambu ini mencapai 1,490, 933 juta dolar, terbesar kedua setelah Amerika Serikat (Santander 2018).

Beberapa industri yang didanai oleh negara luar di RRT ialah: Liteon yang bergerak dibidang elektronik (didanai Taiwan), HSBC yang bergerak dibidang perbankan (didanai Inggris), Sumitomo Corporations yakni perdagangan grosir (didanai oleh Jepang), Volvo yang merupakan perusahaan transportasi (didanai oleh Swedia), Allianz yang bergerak dibidang asuransi (didanai Jerman), dan yang terkenal adalah Apple, dimana barang-barangnya dimanufaktur di Tiongkok (perusahaan berasal dari Amerika Serikat) dan masih banyak lagi (Chen et al. 2015, 86–92). Menjamurnya perusahaan yang didanai asing di RRT menandakan keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi asing, juga iklim investasi yang baik di negeri Panda raksasa ini. Nama-nama perusahaan yang disebutkan diatas menjadi testimoni terlaksananya poin delapan dalam Konsensus Beijing menurut Cheng

Enfu dan Deng Xiaoqin mengenai keterbukaan RRT terhadap perusahaan asing.

Meskipun banyak yang menyebut bahwa Amerika Serikat adalah musuh ekonominya, RRT tidak menutup mata terhadap perusahaan-perusahaan AS yang ingin mendirikan pabrik di negerinya. Ini diperlihatkan dengan banyaknya jumlah nama perusahaan AS yang memiliki pabrik di Tiongkok seperti Apple, Microsoft, IBM, Mc Donald's, HP, Emerson, Ford, Citibank, Wal-Mart dan General Motors (GM). Perusahaan semacam Ford dan GM memiliki pabrik untuk suku cadang dan perakitan di Tiongkok, maka dari itu tidak jarang kita menemukan kata *assembled in china* atau *manufactured in china* dalam suku cadang mobil atau barang elektronik dari pabrik lainnya.

Masuknya banyak perusahaan asing ini sejalan dengan pidato Xi Jinping mengenai implementasi *Free Trade Zone* untuk membangun sistem ekonomi yang terbuka. Keterbukaan menurut Xi, bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan memenangkan kompetisi (ekonomi) di mancanegara (Jinping 2017, 105). Strategi nasional ini sudah dicanangkan semenjak tahun 2007 dalam Kongres ke-18 dari Partai Komunis Tiongkok (PKT). Dengan strategi ini, RRT sudah menafikkan ideologi komunisnya di dunia internasional dan bersiap-siap untuk menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Namun permasalahan liberalisasi ekonomi dapat ditanggulangi dengan peran aktif pemerintah dalam mengawasi perusahaan asing yang membangun pabrik maupun investasi di RRT.

Dalam daftar keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), RRT juga tercatat sebagai member semenjak akhir 2001 (WTO n.d.). Hal ini menandakan bahwa RRT sudah siap dan ingin untuk masuk ke dalam perdagangan internasional, dan berusaha mendominasi perdagangan, baik secara bilateral maupun multilateral untuk menunjukkan supremasi perdagangannya, meskipun berhalauan komunis. Dengan penggunaan ideologi komunis, Tiongkok ingin mengisyaratkan pada dunia, bahwa komunisme dapat

menyaingi kapitalisme yang diusung Amerika Serikat. Bahwa propaganda negara komunis itu miskin dan tertutup sesungguhnya tidak ada.

RRT tetap berusaha untuk menarik lebih banyak investasi untuk masuk ke dalam negeri guna meningkatkan devisa negaranya. Salah satu cara neoliberalisme mempermudah masuknya investasi adalah deregulasi, baik dibidang perdagangan atau investasi. RRT, sebagai salah satu negara komunis harusnya memperketat peraturan berkenaan dengan masuknya investasi. Akan tetapi 2018, RRT di bawah Xi Jinping justru mempermudah masuknya investasi dengan mengurangi peraturan yang ada dalam berinvestasi di sektor perbankan negara, industri mobil dan agrikultur (BBC 2018).

Investasi RRT di Luar Negeri

Dengan masuknya Alibaba ke Indonesia melalui Lazada dan Tokopedia menandakan ekspansi ekonomi yang dilakukan perusahaan publik RRT yang didirikan oleh Jack Ma. Seperti yang dilansir oleh Tirto.id (16/5/2017) mengenai investasi RRT di Indonesia berjumlah 1.734 proyek yang bernilai 2,655 miliar dolar AS. Adapun hutang Indonesia terhadap RRT pada tahun 2016 sebesar 1,035 miliar dolar AS. Hutang ini ditujukan untuk pembangunan dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo. Kebijakan investasi dan peminjaman modal oleh RRT ini diperlihatkan melalui kebijakan One Belt One Road, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut bekerjasama dengan RRT (Kurniawan 2017).

Indonesia dan Tiongkok juga menandatangani kerjasama bilateral untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia yang akan di handle oleh perusahaan Tiongkok. Pertemuan oleh Xi Jinping dan Jokowi dalam Forum One Belt One Road ini menghasilkan kerjasama berupa pinjaman dana sebesar 4,4 miliar dolar untuk pembangunan lajur kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama ini akan terlaksana dalam kurun waktu 2017 sampai 2021 (Sheany 2017). Kerjasama dan investasi yang diterapkan Tiongkok di negara-negara berkembang

memang berbentuk pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, guna memperlancar jalannya perekonomian negara tersebut sebagai dampak dari Konsensus Beijing yang melawan pandangan Konsensus Washington bahwasanya negara maju harus berbentuk seperti negara-negara Eropa atau Amerika Serikat. Pembangunan lokal ini yang ditekankan oleh Tiongkok, sehingga dibawah kepemimpinan Xi Jinping, banyak negara berkembang mau bekerjasama dengan Tiongkok berkenaan dengan proyek pembangunan.

Selain Indonesia, RRT juga berinvestasi di Myanmar untuk wilayah Asia Tenggara. Investasi ini berbentuk pembangunan pelabuhan. Berita yang dilansir oleh The Diplomat (1/1/16) menyatakan bahwa pelabuhan tersebut akan dibangun di Teluk Bengal (Shannon 2016). Perusahaan RRT yang membangun pelabuhan itu adalah CITIC Group yang bergerak dibidang konstruksi, dimana sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan RRT sepenuhnya. Keberadaan perusahaan ini menandakan bahwa investasi Tiongkok tidak hanya perkara uang, namun proyek pembangunan juga. Perusahaan ini bahkan membawa pendapatan sebesar 375 miliar Yuan Tiongkok untuk devisa negaranya.

Tidak hanya proyek pelabuhan, RRT mengajukan kerjasama baru dengan Myanmar agar perusahaannya dapat membantu membangun Kwanlon Bridge dan pembangunan jalan antara Chinshwehaw dan Lashio. Proyek pembangunan ini diajukan oleh Tiongkok kepada Directorate of Investment and Company Administration (DICA) milik Myanmar yang memang berfokus kepada Investasi asing yang masuk ke Myanmar. Kerjasama semacam ini merupakan kebijakan Belt & Road Initiative milik RRT (Htwe 2018). Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa RRT tidak lagi tertarik dengan permasalahan peperangan ideologi, melainkan memperluas investasinya ke negara semacam Myanmar, terutama dalam bentuk kerjasama ekonomi dan pembangunan.

Destinasi lain bagi Tiongkok untuk berinvestasi adalah Afrika Selatan. Seperti yang dilansir oleh Mail & Guardian (24/7/18) bahwa

RRT telah berinvestasi di Afrika Selatan sebesar 14 miliar dolar, ditandai dengan pertemuan antara Presiden Xi Jinping dengan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa (Mhlanga 2018). Ekspansi investasi ekonomi di Afrika Selatan ini memiliki CSR (Corporate Social Responsibility) yang besar, guna membangun pertumbuhan ekonomi negara ini. Usaha Tiongkok dalam menginvestasikan uangnya di Afrika Selatan menandakan bahwa Xi Jinping tidak hanya membidik Asia sebagai lahan investasi RRT, namun Benua Afrika juga. Investasi ini juga membawa keuntungan yang nantinya masuk ke dalam devisa negara untuk RRT. Negara berkembang semacam Afrika Selatan memang menjadi sasaran investor seperti RRT, namun coraknya bukan pembangunan ala Konsensus Washington, melainkan bergaya *post-developmentalism*, dimana pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan negara berkembang yang menjadi lahan investasi.

Australia menjadi tempat di mana investasi RRT bercokol. Greg Jericho menuliskan sekitar 40 miliar juta dollar AS merupakan nominal yang berasal dari investasi perusahaan-perusahaan RRT yang ada di Australia, sekitar 34 perusahaan dimiliki negara dan 200 perusahaan privat, dengan porsi perusahaan milik negara lebih banyak memberikan investasinya (Jericho 2018). Jericho juga memberi contoh proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan milik negara ialah pembangunan Pelabuhan Melbourne dan perusahaan privat mendapatkan proyek kecil-kecil seperti pembangunan Daydream Island di tahun 2015 (Jericho 2018). Investasi yang dilakukan oleh RRT ini nampaknya tidak hanya dilakukan di negara-negara berkembang, negara maju seperti Australia juga mendapatkan investasi dari RRT perihal pembangunan. Gaya investasi Tiongkok selalu menekankan tidak hanya dengan memberi uang, namun proyek pun ikut dilaksanakan. Corak komunisme masih ada dalam investasi RRT yang tidak mau sepenuhnya meninggalkan uang saja. Adapun porsi perusahaan milik negara lebih banyak memberikan investasinya memperlihatkan peranan pemerintah RRT yang sangat kuat dalam mengambil keputusan terkait investasi, di mana corak sentralistik ala

komunisme masih terlihat. Xi Jinping tidak sepenuhnya melepaskan pandangan-pandangan komunisme yang dibawa oleh Mao Tse-Tung, namun dimodifikasi sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan RRT di masa kini (era neoliberalisme).

Investasi Tiongkok di Indonesia selama lima tahun terakhir terikat dengan Belt and Road Initiative (BRI). Dalam sebuah opini yang ditulis oleh Bahlil Lahadalia, ditunjukkan bahwa investasi asing langsung dari Tiongkok di Indonesia adalah yang terbesar ketiga setelah Jepang dan Singapura (Lahadalia 2021). Investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 3,36 miliar dolar AS yang merangkak naik semenjak tahun 2013 yang pada awalnya hanya 297 juta dolar AS yang memang bermula semenjak dicanangkannya BRI oleh Xi Jinping pada tahun itu yang menawarkan kerjasama guna memperbesar kesempatan untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kerjasama yang saling menguntungkan antarpihak yang sejajar dengan proyek Presiden Jokowi yang ingin memberikan pembangunan infrastruktur besar-besaran di Indonesia. Ada empat proyek awal berkaitan dengan investasi Tiongkok di Indonesia yakni, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan kawasan industri KIPI di Kalimantan Utara, Kuala Namu Aerocity dan kawasan industri di Sumatera Utara, pembangunan Bandar Udara Internasional Lembeh, kawasan wisata Likupang dan kawasan industri Bitung di Sulawesi Utara, dan pembangunan *techno park* serta tol di Bali (BKPM t.t.). Adapun, investasi Tiongkok di Indonesia akan difokuskan kepada sektor energi terbarukan, mineral, dan ekonomi digital dan ajang G20 akan menjadi acara yang mendorong lebih banyak investasi Tiongkok ke Indonesia (Aldila 2022). Upaya investasi besar-besaran dari negeri tirai bambu ini berusaha untuk membangun Indonesia dari segi infrastruktur, karena dapat dilihat di atas, kerjasama yang dibentuk mayoritas berbentuk pembangunan fisik dan jarang sekali disebutkan dalam bentuk pembangunan suprastruktur. Kerja sama ini tentunya memiliki tawar-menawar tersendiri yang memperlihatkan bentuk kapitalisme dari Tiongkok terhadap negara yang bekerja sama

dengannya seperti Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari adanya Konsensus Beijing yang berbeda dengan Konsensus Washington dan pertarungan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dari beberapa contoh diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa RRT meskipun mengaku negara dengan dasar komunisme sebagai ideologinya, memiliki cara tersendiri dalam memaknai komunisme sesuai dengan tradisi dan kebudayaan di negaranya. Gabungan antara komunisme dan kebudayaan Tiongkok kuno ini yang disebut dengan Maoisme yang berbeda dengan komunisme di Uni Soviet. Maoisme terlihat sekali coraknya dalam Konsensus Beijing yang berusaha membangun negara tempat dimana Tiongkok berinvestasi sesuai dengan kebutuhannya. RRT tidak mematok pembangunan harus dibentuk seperti apa, sehingga banyak negara yang mau dijadikan tempat investasi negeri tirai bambu ini. Di dukung dengan kebijakan One Belt One Road, RRT memang tetap memegang teguh komunismenya untuk diterapkan di dalam negeri, namun di luar negeri, Tiongkok sangatlah terbuka dengan perdagangan karena kebudayaannya. Disinilah titik dimana RRT sebagai negara komunis, masih mampu bertahan bahkan bersaing dengan Amerika Serikat.

Perubahan pemahaman RRT terhadap komunisme dituangkan dalam program-program pembangunan yang bertujuan untuk membangun negara-negara berkembang acapkali memperlihatkan Maoisme (komunisme RRT) sebagai cabang komunisme yang dapat berdamai dengan neoliberalisme. Namun perpaduan komunisme-neoliberalisme ini justru membentuk RRT sebagai negara yang adikuasa secara ekonomi dan dianggap sebagai negara yang inkonsisten dalam mengikuti salah satu ideologi. Keterbukaan RRT terhadap investasi membuat negara ini tidak lagi menganut Marxis Ortodoks layaknya Uni Soviet, namun menjadi negara yang menggunakan komunisme sebagai alat justifikasi PKT untuk melanggengkan kekuasaan di RRT dan diluar negeri mereka (PKT) akan terlihat lebih lunak untuk menarik/memberi investasi kepada negara lain, terutama negara berkembang.

Kesimpulan

Sebagai negara dengan ideologi komunis, RRT memiliki sistem pemerintahan yang tersentralistik dimana mayoritas perusahaan adalah milik negara. Kebijakan One Belt One Road yang melancarkan jalur investasi RRT ke luar negeri juga menjadi implementasi Konsensus Beijing yang melawan gaya pembangunan Konsensus Washington. Model pembangunan tidak hanya difokuskan dengan gaya-gaya ala Barat, namun disesuaikan dengan keinginan negara yang sedang dibangun. Dengan harga yang lebih murah terkait bahan-bahan material, RRT segera menjadi raja di pasar internasional, terlepas dari ideologi komunisme mereka. Komunisme dimaknai tidak sekedar dalam bentuk pertarungan kelas oleh pemerintah maupun masyarakat RRT, akan tetapi sebuah ideologi yang berusaha mengangkat harkat dan martabat negara lain. Pertarungan kelas sudah usai semenjak Revolusi Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Tse Tung. Tugas utama Tiongkok sekarang adalah membangun negara-negara yang sedang berkembang.

Bonus demografi Tiongkok yang sangat besar membuat mereka tidak hanya mengekspor komoditas, melainkan juga tenaga kerja. Kebijakan RRT macam ini yang terkadang membuat negara berkembang yang penduduknya masih banyak angka penganggurannya seperti Indonesia menjadi geram, terutama masyarakatnya. Meskipun pembangunan disesuaikan dengan keinginan pemerintah negara berkembang yang menjadi kreditur dari RRT, namun pembangunan ini banyak berbentuk infrastruktur, tidak termasuk lapangan kerja, padahal permasalahan tersebut termasuk problematika yang seharusnya juga menjadi keuntungan negara kreditur. Sedangkan investasi asing ke dalam RRT juga semakin dipersulit dengan banyaknya aturan-aturan untuk mendirikan perusahaan di negeri panda ini. Tiongkok menginginkan akses yang mudah untuk menawarkan investasinya di negara lain, sedangkan mempersulit investasi ke dalam negerinya, karena kebijakan Tiongkok

semacam ini, sejatinya komunisme hanyalah kedok untuk mengamankan perputaran modal di dalam negeri ditambah dengan usaha PKT dalam melanggengkan kekuasaan, sehingga pantas dipanggil Negeri Tirai Bambu, sedangkan saat menawarkan investasi, mereka akan memasang wajah neoliberal dan mendukung liberalisasi sekaligus deregulasi yang berkaitan dengan investasi asing di sebuah negara.

Pemerintah RRT sangatlah berkuasa menentukan perekonomian dalam negeri dan bercorak sentralistik, terutama di bawah Xi Jinping, namun di kancah perekonomian dunia, permainan RRT mengikuti jalannya mekanisme pasar yang dijalankan melalui hutang, investasi, dan perdagangan, baik bilateral maupun multilateral. Maka dari itu, Maoisme yang digadang-gadang oleh RRT hanyalah retorika dalam negeri PKT dan pemerintah RRT untuk mempertahankan kursi kepemimpinan yang sebenarnya adalah usaha keduanya untuk meraup keuntungan dari perdagangan internasional dengan dalih perdagangan sebagai budaya Tiongkok yang harus dilestarikan. Komunisme hanyalah baju yang digunakan untuk menutupi watak neoliberal PKT & RRT, dengan alasan permasalahan ekonomi dapat dilaksanakan setelah permasalahan politik dalam negeri sudah usai. Pastinya Xi Jinping telah berhasil membangun citra politiknya dan menggunakan Maoisme untuk mempertahankan kursi kepemimpinannya sembari memperkuat opini publik tentang RRT sebagai negara adikuasa secara ekonomi yang menjadi saingan dari Amerika Serikat. Memang benar pandangan Samir Amin bahwa RRT adalah *emerging forces* pada abad 21 ini.

Daftar Pustaka

- Aldila, Nindya. 2022. "Investasi China Ke Indonesia Bakal Diutamakan Dari Sektor Ini." Bisnis.Com. 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220322/9/1513898/investasi-china-ke-indonesia-bakal-diutamakan-dari-sektor-ini>.
- Amin, Samir. 2013. *The Implosion of Contemporary Capitalism*. New York: Monthly Review Press.

- BBC. 2018. "China Eases Some Foreign Investment Rules." BBC News. June 28, 2018. <https://www.bbc.com/news/business-44639257>.
- Bedfordshire, University of. n.d. "Writing the Method Section of a Systematic Literature Review in a Dissertation." *Learning Resources*.
- BKPM. n.d. "Mengejar Investasi Negeri Tirai Bambu." Bkpm.Go.Id. Accessed June 22, 2022. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/mengejar-investasi-negeri-tirai-bambu>.
- Chen, Jiagui, Qunhui Huang, Huagang Peng, and Hongwu Zhong. 2015. *Research Report on Corporate Social Responsibility of China*. Current Chinese Economic Report Series. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-45363-6>.
- Enfu, Cheng, and Deng Xiaoqin. 2017. "A Theory of China's 'Miracle': Eight Principles of Contemporary Chinese Political Economy." January 1, 2017. <https://monthlyreview.org/2017/01/01/a-theory-of-chinas-miracle/>.
- Htwe, Chan Mya. 2018. "China Proposes New Infrastructure Projects in Myanmar." Myanmar Times. June 12, 2018. <https://www.mmtimes.com/news/china-proposals-new-infrastructure-projects-myanmar.html>.
- Jericho, Greg. 2018. "Following the Money: Where China's \$40bn Investment in Australia Is Going." The Guardian. October 9, 2018. <https://www.theguardian.com/business/commentisfree/2018/oct/09/following-the-money-where-chinas-40bn-investment-in-australia-is-going>.
- Jinping, Xi. 2017. *The Governance of China II*. Beijing: Foreign Language Press.
- Johnson, Graham E., and Yuen-fong Woon. 1997. "Rural Development Patterns in Post-Reform China: The Pearl River Delta Regions in the 1990s." *Development and Change* 28 (4).
- Kurniawan, Frendy. 2017. "Tren Kenaikan Investasi Cina Di Indonesia." Tирто.Id. 2017. <https://tirto.id/tren-kenaikan>

- investasi-cina-di-indonesia-coNd.
- Lahadalia, Bahlil. 2021. "Mengupas Kerja Sama Investasi China Di Indonesia." Kompas.Com. 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investasi-china-di-indonesia>.
- Mhlanga, Thulebona. 2018. "China Commits More Investments in South Africa." Mail and Guardian. July 24, 2018. <https://mg.co.za/article/2018-07-24-china-commits-more-investments-in-south-africa>.
- Pei, Minxin. 2016. *China's Crony Capitalism*. Massachussets: Harvard University Press.
- Ramo, Joshua Cooper. 2004. *The Beijing Consensus*. London: The Foreign Policy Center.
- Santander. 2018. "China: Foreign Investment." Santander Trade Portal. 2018. <https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/china/foreign-investment>.
- Shannon, Tiezzi. 2016. "Chinese Company Wins a Contract with Deep Sea Port in Myanmar." The Diplomat. January 1, 2016. <https://thediplomat.com/2016/01/chinese-company-wins-contract-for-deep-sea-port-in-myanmar/>.
- Sheany. 2017. "Indonesia, China Strengthen Cooperation in Infrastructure Development." Jakarya Globe. May 15, 2017. <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-china-strengthen-cooperation-infrastructure-development>.
- The Writing Center. n.d. "Literature Review." University of North Carolina at Chapel Hill. Accessed January 3, 2019. <https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/literature-reviews/>.
- WTO. n.d. "Members and Observers." World Trade Organization's Official Site. Accessed December 26, 2018. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.